



Sejarah Kesultanan Bilah pada Masa Kolonial Belanda, 1865-1942

Sabda Firmansyah Rambe*, Laila Rohani & Abdul Karim Batubara

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

ABSTRACT

This article discusses the history and development of the Bilah Sultanate which is currently located in Labuhanbatu Regency. This sultanate is one of the influential sultanates in the East Sumatra region, especially Labuhanbatu. This sultanate became the conquered territory of the Siak Indrapura Sultanate which was supported by the Dutch. This article uses a historical research method with four steps, namely: heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The author's data collection was done by directly visiting the locations of the former areas of the Bilah Sultanate, interviews with traditional leaders and descendants, as well as written data from archives, books, journals and so on. The results showed that the Sultanate of Bilah had a period of prosperity as a result of its cooperation with the Dutch Colonial. Plantation investments made by European businessmen in the Labuhanbatu region and its surroundings were the reason this sultanate became so prosperous. However, because of its proximity, the Sultanate of Bilah also became a victim of the ferocity of the anti-feudalism (social revolution) movement in 1946 which targeted the Malay aristocrats in East Sumatra. The tragedy marked the end of the existence of the Blade Sultanate in the Labuhanbatu region.

ARTICLE HISTORY

Submitted 01 April 2022
Revised 15 April 2022
Accepted 29 April 2022

KEYWORDS

Sultanate of Bilah; Dutch Colonial; history; Labuhanbatu.

CITATION (APA 6th Edition)

Rambe, S.F., Rohani, L., & Batubara, A.K. (2022). Sejarah Kesultanan Bilah pada Masa Kolonial Belanda, 1865-1942. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, 3(1), 25-32.

*CORRESPONDANCE AUTHOR

sabdafirmansyah11@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.34007/warisan.v3i1.1215>

PENDAHULUAN

Kesultanan Bilah merupakan kesultanan Melayu Islam yang berdiri di wilayah Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Kesultanan ini didirikan oleh Sutan Tahir Indra Alam pada sekitar tahun 1630 M. Pendiri kesultanan ini memiliki darah keturunan dari Kesultanan Pinang Awan yang berada di Kota Pinang (Sinar, 2006). Sultan Tahir Indra Alam kemudian membuka wilayah baru di Muara Kumbul sampai beliau wafat dan diberi gelar *Marhum Mangkat di Kumbul*. Wilayah inilah yang menjadi asal mula lahirnya Kesultanan Bilah.

Nama Kesultanan Bilah sendiri diambil dari kata bilah yang bermakna sebelah/sepotong pohon yang berasal dari pohon nibung yang dahulu banyak tumbuh di pinggir sungai Bilah. Masyarakat setempat sering menyebut pohon ini dengan nama bilah nibung atau bilah rotan. Sebutan inilah yang kemudian menjadi asal-muasal nama dari Kesultanan Bilah dan Sungai Bilah yang ada di wilayah tersebut (Syarif, 2017). Sungai Bilah merupakan sungai terbesar di wilayah Labuhanbatu yang bermuara ke Selat Malaka. Sungai ini memiliki peran penting bagi Kesultanan Bilah karena menjadi jalur perdagangan dan penghubung dengan wilayah lainnya. Sungai ini juga merupakan sarana transportasi masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan, baik masyarakat setempat yang didominasi suku Melayu maupun masyarakat pendatang dari daerah lain di luar Kesultanan Bilah.

Pada awal berdirinya, sebagai kesultanan Islam, Kesultanan Bilah juga ikut andil dalam menyebarkan syiar Islam di wilayah kekuasaannya. Sultan Tahir Indra Alam sebagai sultan pada masa itu memerintahkan penyebaran Islam ke wilayah-wilayah di sekitar Kesultanan Bilah, seperti Panai dan Kota Pinang. Penyebaran Islam juga berpengaruh kepada sistem kepercayaan masyarakat, sehingga mayoritas masyarakat di wilayah Labuhanbatu beragama Islam. Selain itu, Kesultanan Bilah yang dipimpin oleh seorang Sultan juga memasukkan unsur-unsur Islam pada sistem pemerintahan, hukum dan budaya yang berdampak bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi identitas dari Kesultanan Bilah sebagai salah satu Kesultanan Islam di Pantai Timur Sumatera (Sinar, 2006).

Dalam perkembangannya, ketika Kesultanan Bilah diperintah oleh Sultan Musa Bidar Alamsyah III (1865-1904 M), kesultanan ini melakukan kerja sama dengan pihak Kolonial Belanda. Kesultanan Bilah melakukan kerjasama dengan



kolonial Belanda di bidang perekonomian, pemerintahan, dan perluasan wilayah yang membuat Kesultanan Bilah menjadi kesultanan kaya yang berdampak pada pola hidup mewah di kesultanan ini. Hal ini juga berdampak kepada dinamika kehidupan masyarakat di wilayah Labuhanbatu pada masa tersebut (Pelzer, [1985](#)).

Pembukaan perkebunan karet dan kelapa sawit menandai keberadaan kolonial Belanda di wilayah Kesultanan Bilah. Perkebunan tersebut bercampur dengan hasil bumi yang lebih dulu ditanam oleh masyarakat setempat seperti; kopra, rotan, jernang dan damar (Akbar, [2018](#)). Perkembangan perkebunan tersebut membuat pertumbuhan ekonomi Kesultanan Bilah meningkat sehingga membuat kehidupan para Sultan menjadi lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan dibangunnya istana, masjid, dan bangunan lain di wilayah Kesultanan Bilah.

Pembagian wilayah yang dilakukan oleh kolonial Belanda berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan masyarakat yang tinggal di wilayah Kesultanan Bilah. Pertumbuhan yang dimaksud mengarah kepada perkembangan pasar (pekan) sebagai pusat ekonomi. Selain itu, pembangunan infrastruktur dan layanan publik, serta persebaran demografi juga ikut berkembang karena pembagian wilayah tersebut. Hal ini juga berdampak kepada bentuk kerjasama dan perjanjian yang dilakukan antara Kesultanan Bilah dengan pemerintah Kolonial Belanda.

Bentuk kerjasama dan perjanjian yang dilakukan pada umumnya memanfaatkan wilayah untuk kepentingan ekonomi maupun perkembangan perkebunan (Suwirta, [2002](#)). Misalnya dalam hal membuka perkebunan baru, pihak kolonial Belanda melakukan negosiasi dengan pihak Kesultanan Bilah, yang mana keuntungan hasil perkebunan yang ditanam akan diberikan kepada Sultan sebagai penguasa daerah tersebut. Selain itu, pihak Kolonial Belanda juga meminta masyarakat Melayu di Bilah untuk bekerja dengan upah yang ditentukan oleh pihak Kolonial Belanda (Ningsih, Melay, & Kamaruddin, [2016](#)).



Gambar 1. Istana Kesultanan Bilah
(Sumber: sultansinindonesieblog.wordpress.com)

Selain pembukaan perkebunan, kehadiran Kolonial Belanda di wilayah Kesultanan Bilah juga dilatarbelakangi oleh tujuan perluasan wilayah di sekitar Sumatera Timur (Sumanti & Batubara, [2019](#)). Hal tersebut dilihat dari pembagian wilayah kekuasaan antara pemerintah Kolonial Belanda dan Kesultanan Bilah. Pada batas-batas dan ketentuan tertentu ditetapkan kontrak-kontrak politik yang berdampak kepada lahirnya dua bentuk pemerintahan, yaitu *Landschap* dan *Gouvernement*. Lebih lanjut, dalam melakukan pembagian wilayah, Kolonial Belanda membagi daerah Kesultanan Bilah menjadi dua bagian, yaitu Negeri Lama (swapraja) di bawah penguasaan Kesultanan Bilah, dan Rantauprapat (kotapraja) di bawah kekuasaan Kolonial Belanda. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan Rantauprapat sebagai wilayah perkebunan yang terbentuk melalui *onderafdeeling* (Kartodirdjo & Suryo, [1991](#)). Hal ini diperkuat oleh narasumber yang penulis wawancarai, beliau mengatakan: “Belanda telah berhasil menyatukan wilayah kesultanan yang belum pernah memiliki kesatuan politik dan administratif. Di samping itu, Belanda juga telah menghubungkan antara wilayah Sumatera Timur dengan Jawa. Dengan cara demikian Sumatera Timur telah memiliki identitas baru.” (wawancara dengan Muhammad Zen Nasution).

Kemudian, perkembangan kerjasama tersebut berlanjut terhadap kesultanan-kesultanan lain di sekitar wilayah Kesultanan Bilah. Kerjasama tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi Kesultanan Bilah, di mana Kesultanan Bilah mendapat hasil dari perkebunan kelapa sawit dan karet yang telah dibangun Belanda, dan masyarakat Melayu Bilah mendapat gaji atau upah atas pekerjaan yang mereka lakukan. Sehingga perkembangan yang terjadi terhadap Kesultanan Bilah sedikit meningkat dari sebelumnya. Akan tetapi dibalik keuntungan yang didapat oleh Kesultanan Bilah, kerugiannya adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan Kolonial Belanda terhadap Bilah sangat tidak wajar, karena

peraturan yang dibuat sangat merugikan Kesultanan Bilah dan masyarakat. Sistem kerja paksa dan hukuman apabila pekerja (kuli) tidak menepati perjanjian kerja yang sudah disepakati sebelumnya (Nasution, [2016](#)).

Kekuasaan Kesultanan Bilah berakhir pada tahun 1946 yang terjadi akibat pecahnya tragedi Revolusi Sosial yang menyasar hampir seluruh kesultanan Melayu yang ada di Sumatera Timur (Harahap & Ramadhani, [2019](#)). Penguasa terakhir Kesultanan Bilah ialah Sultan Bidar Alamsyah yang juga wafat pada tahun yang sama. Namun kondisi Kesultanan Bilah saat ini sudah sangat berbeda karena hanya ada beberapa peninggalan sejarah yaitu seperti makam-makam dan masjid. Sementara istana Kesultanan Bilah sudah tidak terlihat lagi sisa peninggalannya karena tidak ada yang menempati pasca terjadinya tragedi tersebut. Kemudian keturunan dari Sultan Adil Bidar Alamsyah mencoba untuk menghidupkan kembali Kesultanan Bilah dengan diangkatnya Tengku Muhammad Risfanyah gelar Bidar Alamsyah X sebagai Pemangku Adat Kesultanan Bilah yang ditabalkan pada 14 Maret 2020.



Gambar 2. Bangsal kuli di salah satu perkebunan di Rantauprapat
(Sumber: Pasaribu, [2014](#)).

Berangkat dari pemaparan di atas, artikel ini berfokus pada pembahasan tentang sejarah dan perkembangan Kesultanan Bilah pada masa Kolonial Belanda. Aspek-aspek yang dibahas berupa aspek politik, sosial, dan ekonomi, serta pengaruh kerja sama antara Kesultanan Bilah dengan pihak Kolonial Belanda. Periodisasi tahun penulis menetapkan tahun 1865 sebagai batas awal dan 1942 sebagai batas akhir. Tahun 1865 sebagai batas awal ditetapkan karena menjadi tahun dimulainya kerja sama dengan pihak Kolonial Belanda, dan tahun 1942 ditetapkan sebagai batas akhir karena menjadi tahun berakhirnya kekuasaan Kolonial Belanda di Labuhanbatu.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode sejarah menurut Daliman adalah seperangkat aturan sistematis yang didesain guna membantu secara tajam dan menyuguhkan temuan-temuan yang didapat secara tertulis. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan peristiwa atau kejadian pada masa lampau. Langkah-langkah dalam metode penelitian sejarah ada empat, yaitu: heuristik, kritik atau verifikasi, interpretasi, dan historiografi (Daliman, [2018](#)).

Dalam penelitian ini, data penulis dapatkan dari hasil observasi di bekas-bekas peninggalan Kesultanan Bilah di Kabupaten Labuhanbatu. Data utama penelitian ini ialah wawancara dengan Tokoh Adat Kesultanan Bilah, yaitu Raja Muhammad Azwin. Sementara data tambahan penelitian ini ialah wawancara dengan pemerhati sejarah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Labuhan Batu, serta beberapa keturunan dari Kesultanan Bilah. Data yang sudah dikumpulkan, penulis pilah sesuai dengan topik yang sedang penulis bahas, dan mengaitkannya dengan keadaan sejarah Kesultanan Bilah pada masa Kolonial Belanda di Labuhanbatu. Setelah itu, barulah penulis masuk pada tahap akhir dalam metode sejarah yaitu penulisan (historiografi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Berdirinya Kesultanan Bilah

Menurut *Teromba Kota Pinang* silsilah Kesultanan Bilah bermula dari rombongan yang berangkat melalui Tapanuli Selatan pada awal abad ke-16 M. Sedangkan menurut *Teromba Bilah* putra Raja Pagaruyung Sultan Alamsyah Syaifuddin yaitu Sultan Batara Guru Pinayungan atau Sultan Batara Guru Sinomba bersama adiknya Puteri Lenggani dan Batara Guru Payung pergi menuju Sumatera Timur. Namun dalam perjalanannya Batara Guru Sinomba dan Batara Guru Payung berbeda tujuan. Batara Payung pergi ke Tapanuli Selatan dan menikah dengan penduduk asli dan menjadi Raja

di sana dan dinobatkan menjadi marga Nasution. Sedangkan Batara Guru Pinayungan atau Batara Guru Sinomba oleh marga Tambak Dasopang diangkat menjadi Raja di Pinang Awan bersama adiknya Puteri Lenggani. Setelah meninggal Batara Guru Pinayungan atau Batara Guru Sinomba diberi Gelar Marhum Di Hutang Momok Bertahta. Keturunan dari Batara Guru Pinayungan bergelar Marhum Mangkat di Jambu (Sinar, [2006](#)).

Kepergian mereka dari Pagaruyung (Minangkabau) menuju Sumatera Timur lambat laun menjadikan masing-masing dari mereka Raja di daerah Sumatera Timur karena menikah dengan penduduk asli maupun dijadikan raja karena kehebatannya. Sementara menurut Farizal, Batara Guru Pinayungan atau Batara Sinomba menikahi Puteri Lenggani yang tak lain adalah adik tirinya sendiri, dan mendapat keturunan bernama Sultan Musa (Marhum Mangkat di Jambu). Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa asal usul Kesultanan Bilah ini berasal dari keturunan Raja Pagaruyung bernama Sultan Alamsyah Syaifuddin, yang memiliki anak bernama Sultan Batara Guru Pinayungan, Puteri Lenggani dan Sultan Batara Guru Payung (Nasution, [2016](#)). Namun penjelasan tersebut menurut penulis sendiri masih memerlukan data dan penelitian yang lebih lanjut. Pasalnya penjelasan tersebut banyak berasal dari *folklor* yang sering disampaikan oleh masyarakat setempat.

Sultan Tahir Indra Alam yang memerintah Kesultanan Bilah (1630-1650 M), merupakan anak dari keturunan Sultan Pinang Awan yang berada di Kota Pinang yaitu Sutan Musa atau dikenal Marhum Mangkat di Jambu yang terbunuh sekitar tahun 1617 M. Salah satu anaknya bernama Raja Tahir gelar Indra Alam, melarikan diri dan jatuh ke daerah Bandar Kumbol, Hulu Sungai Bilah. Hal-hal yang terjadi di masa kedatangannya ke daerah itu tidak dapat diketahui dengan jelas. Belakangan sesuai dengan sejarah yang digunakan oleh Kesultanan Bilah, Raja Tahir Indera Alam menjadi Raja Kesultanan Bilah pertama, tetapi tidak mempunyai wilayah yang luas seperti raja-raja yang berkuasa. Wilayahnya hanya terbatas di daerah Kumbol, ini pun sebagian dipunyai Raja Kecil Bandar Kumbol.

Sultan Tahir adalah raja yang dirajakan oleh raja-raja kecil di daerah itu dan setiap tahunnya membayar upeti. Beliau wafat di Kumbol dan diberi gelar Marhum Mangkat di Kumbol. Wilayah inilah yang menjadi asal mula lahirnya Kesultanan Bilah. Pada masa Sultan Tahir Indera Alam menjadi penguasa Kesultanan Bilah pertama, wilayah kekuasaannya meliputi daerah-daerah yaitu: Kerajaan Rantauprapat, Siringo-ringo, Sihare-hare (Sigambal), Gunung Maria, Bandar Kumbol, Sibargot, Tanjung Medan (Hulu Sungai Bilah), Kualah Pinarik, termasuk juga daerah Kerajaan Merbau dan sekitarnya (wawancara dengan Raja Muhammad Azwin).

Setelah wafatnya Sultan Tahir Indera Alam, diangkatlah anaknya Sultan Tahir II bergelar Maharaja Nulong. Namun sang pewaris ini masih belum cukup usia, sehingga pemangku adat sementara dipegang oleh Sutan Yunus. Hal ini tidak berlangsung lama, pasalnya tiga tahun kemudian, Sutan Yunus sebagai ayah asuh Maharaja Nulong meninggal dunia. Oleh sebab itu, di usia yang masih beranjak dewasa, Maharaja Nulong diangkat menjadi penguasa Kesultanan Bilah.

Maharaja Nulong (sulung) memiliki dua orang anak; pertama bernama Raja Murai, kedua bernama Raja Laut karena lahir di laut ketika perjalanan pulang dari Riau ke Bilah. Ketika anak-anaknya sudah mulai tumbuh dewasa Maharaja Nulong banyak mengajari anaknya baik itu tentang mengatur pemerintahan, serta hubungan dengan kesultanan-kesultanan lainnya. Setelah banyak membimbing anaknya Maharaja Nulong wafat sekitar tahun 1695 M dan dimakamkan di Bilah (Dahlan, [2014](#)).

Setelah itu Kesultanan Bilah dipimpin oleh Raja Laut (1770-1728 M) dan wafat pada tahun 1728 dan dimakamkan di Teluk Belanti. Beliau memiliki dua orang anak, yaitu: Raja Hamuin (sulung) yang kelak akan menjadi raja ke-4 Kesultanan Bilah, dan adiknya Raja Iskandarsyah yang pergi ke Silindung Bulan (Panai). Kesultanan Bilah dibagi menjadi dua yang satu di Tanjung Pogas untuk sang kakak dan satunya di Sialang Taji untuk adiknya, dua daerah ini hanya dibatasi Sungai Bilah. Pada masa Raja Mulia Janji dan Raja Indar Muda memerintah Kesultanan Bilah ke-5 sekitar tahun 1786 M, datanglah panggilan Sultan Siak kepada mereka untuk menghadap dan membayar upeti tahunan agar diberi gelar dan kedudukannya diakui. Namun mereka berdua baik Raja tidak mau berangkat, maka dipanggillah Raja Muhammad yang merupakan saudara mereka yang pergi ke Riau dari Panai, untuk menghadap ke Kesultanan Bilah.

Selepas wafatnya Raja Mulia, Kesultanan Bilah dipimpin oleh Raja Hitam Patah dan pada tahun 1835 M digantikan oleh anaknya Raja Musa. Setelah Raja Musa menjadi Raja Bilah untuk wilayah Sungai Abal, beliau berkeinginan untuk menyatukan kembali Kesultanan Bilah dan ingin menguasai wilayah saudaranya yang lain. Beliau tidak peduli walaupun bukan merupakan keturunan Raja Bilah dan wilayah Sungai Abal adalah pemberian untuk kakeknya. Raja Musa sangat berambisi untuk merebut wilayah Bilah yang lain dan hanya satu raja yaitu dia sendiri. Akan tetapi ketika Raja Musa merebut secara paksa pasti akan terjadi perang dan beliau kalah karena menghadapi dua raja sekaligus. Dengan sistem kawin politik ini Kesultanan Bilah untuk wilayah Tanjung Pogas dapat jatuh perlahan ke tangan Raja Musa untuk pertama kali pernah juga membuat seperti itu kepada anak keturunan Raja Ocek (Pasaribu, [2014](#)).

Sebelum wafatnya Sutan Musa, beliau meninggalkan amanat kepada Raja Sulaiman agar kelak sepeninggalnya, anaknya Raja Abbas yang masih muda supaya diangkat menjadi Raja Bilah dan dipangku oleh Raja Sulaiman menunggu Raja Abbas dewasa. Raja Sulaiman dalam kedudukannya telah merasa menjadi Raja, karena kekuasaan penuh berada di tangannya. Dengan niat yang buruk, secara tidak langsung dia ingin menguasai Kesultanan Bilah dengan menyuruh Raja Mindah (saudara Raja Abbas lain ibu) agar mencuri cap kesultanan dan menjanjikan kepadanya, apabila dia telah menjadi Raja, akan diangkat Raja Mindah tersebut menjadi Raja Muda.

Ketika Sutan Abbas dewasa, beliau menuntut haknya untuk diangkat sebagai Raja, namun berkali-kali tidak pernah diterima oleh Raja Sulaiman. Lalu Sutan Abbas diam-diam mengadakan persoalan tersebut kepada *Controleur* Belanda. Setelah melalui penyelidikan dan untuk menjaga wibawa Pemerintahan Belanda di daerah ini, pada tahun 1883 M atas nama Pemerintah Belanda, lalu menangkap Raja Sulaiman sebagai Raja Muda Kesultanan Bilah. Pemerintah Belanda menghukum selama 25 tahun dan dibuang ke Bengkalis, setelah hampir 20 tahun memegang kekuasaan di Kesultanan Bilah.

Raja Abbas meninggal sekitar tahun 1925 dimakamkan di Negeri Lama, namun Raja Kesultanan Bilah adalah Tengku Sutan Adil Bidar Alamsyah anak Raja Abbas yang beliau angkat pada tahun 1904. Pada masa pemerintahan Sultan Adil, Kesultanan Bilah makin bertambah buruk, karena banyak yang menuntut wilayah yang pernah dirampas agar dikembalikan, sehingga banyak yang tidak suka terhadapnya dan ingin meruntuhkan kekuasaannya. Terbukti setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, satu tahun kemudian atau pada tahun 1946 terjadi pemberontakan yang dikenal dengan sebutan Revolusi Sosial. Sultan Adil terbunuh dan pada masa itu juga berakhirnya Kesultanan Bilah bahkan Kesultanan atau Kerajaan lain di Sumatera Timur juga terkena dampaknya (Reid, [2012](#)).



Gambar 3. Masjid dan makam peninggalan Sultan Abbas di Negeri Lama

(Sumber: dokumentasi pribadi).

Kesultanan Bilah pada Masa Kolonial Belanda

Kampung Labuhanbatu pada awalnya berada di wilayah yang dikuasai oleh Kesultanan Panai, tepatnya berada di Labuhan Bilik. Residen Sumatera Timur E. Netscher mencoba untuk mengunjungi wilayah-wilayah ini untuk mengetahui kesediaan pihak kesultanan untuk tunduk di bawah Kolonial Belanda. Namun sebelum itu, pihak Kolonial Belanda mengutus Raja Burhanuddin pada 1862 M untuk mengumpulkan informasi mengenai kesultanan-kesultanan Melayu di Sumatera Timur dan kesediaan para sultan untuk menerima masuknya Kolonial Belanda di wilayahnya (Sinar, [2006](#)).

Setelah mengunjungi wilayah-wilayah tersebut, Raja Burhanuddin menghadap ke Residen Sumatera Timur yang berada di Bengkalis, Riau. Tujuan kedatangannya adalah untuk menyerahkan laporan kepada Residen Sumatera Timur. Setelah mendapat laporan tersebut barulah Residen E. Netscher mempersiapkan keberangkatannya ke wilayah Sumatera Timur dengan tujuan memulihkan kekuasaan Kesultanan Siak di wilayah tersebut (Hutagaol, [2016](#)). Labuhanbatu menjadi wilayah pertama yang dikunjungi oleh Residen Netscher, wilayah ini berbatasan langsung dengan wilayah Kesultanan Siak yang menjadikan wilayah ini tidak luput dari perhatian Kolonial Belanda.

Kedatangan Residen Netscher ke Labuhanbatu bersama rombongan menggunakan kapal perang Belanda yang bersandar di wilayah Kesultanan Panai. Kedatangan ini dilakukan oleh Residen Netscher untuk bertemu dengan Sultan Bilah dan Sultan Panai di atas kapal tersebut. Sultan Mustafa dari Kesultanan Kota Pinang yang mengetahui kedatangan Belanda ke wilayah Panai, turut datang menemui Residen E. Netscher. Kesultanan Bilah diwakili oleh Sultan Tengku Musa gelar Bidar Alam dan Kesultanan Panai diwakili oleh Sultan Tengku Abdullah gelar Gagar Alam untuk memenuhi undangan dari Residen Sumatera Timur (Perret, [2010](#)).

Kesultanan Panai yang mengalami kekalahan saat perang, meminta bantuan Kesultanan Bilah dan Asahan untuk membantunya merebut kembali wilayah Panai yang dikuasai Kesultanan Kota Pinang. Pada tahun 1848, Kesultanan Panai yang dibantu oleh Kesultanan Bilah dan kesultanan Asahan menyerang Sultan Mustafa yang telah memindahkan pusat kesultannya ke wilayah Panai. Dalam penyerangan tersebut, Sultan Mustafa dan pasukannya memilih mundur karena kekuatan yang dimilikinya tidak sebanding dengan ketiga kesultanan tersebut. Kemenangan Kesultanan Panai belum dianggap cukup, karena beberapa wilayahnya masih ada dibawah kesultanan Kota Pinang (Pasaribu, [2014](#)).

Pada tahun 1865, pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan dua surat keputusan untuk wilayah Labuhanbatu. Surat keputusan yang pertama tertanggal 27 Juni 1865, dalam isinya pemerintah Kolonial Belanda menerima wilayah yang diberikan Kesultanan Panai dan Kesultanan Kota Pinang kepada Raja Burhanuddin. Surat yang kedua tertanggal 3 Oktober 1865, menempatkan seorang *controleur* sebagai perwakilan pemerintah Kolonial Belanda di Labuhanbatu yang bertugas untuk melakukan hubungan dengan Kesultanan Bilah, Panai dan Kota Pinang (Ismail, [2012](#)). Pemerintah Belanda membangun kantor administrasi sebagai pusat pemerintahannya di Labuhanbatu. Kampung Labuhanbatu yang merupakan wilayah pemberian dari Kesultanan Panai dan Kesultanan Kota Pinang dijadikan Belanda sebagai pusat pemerintahannya. Semua kegiatan pemerintah Belanda di Labuhanbatu dijalankan dari kantor pusat di Kampung Labuhanbatu.

Setelah menguasai wilayah Labuhanbatu dan sekitarnya (Bilah, Panai, Kota Pinang, dan Kampung Raja), dan menetapkan seorang *controleur* di wilayah ini, keadaan masyarakat Kesultanan Bilah mulai mengalami perubahan. Terjadi perubahan besar, terutama di bidang pemerintahan yang selama ini dipegang dan dijalankan oleh pihak Kesultanan, sedikit demi sedikit mulai dibatasi, tidak terkecuali di bidang hukum dan ekonomi (wawancara dengan Muhammad Zen Nasution). Beliau menambahkan tidak hanya keburukan, namun kedatangan Belanda ke wilayah ini juga membawa kebaikan, seperti: perbaikan sarana transportasi (darat dan air), membangun jalan yang menghubungkan dengan daerah lainnya. Namun kemajuan ini juga ditandai dengan pemberlakuan peraturan oleh pemerintah Kolonial Belanda dengan sistem kerja paksa atau dikenal dengan Rodi dan ditambah pula dengan *Belasting*.

Dikeluarkannya dua peraturan ini (Rodi dan *Belasting*) pada tahun 1907 di wilayah Labuhanbatu, khususnya Kesultanan Bilah menyebabkan timbulnya keresahan di kalangan masyarakat. Karena mereka dipaksa untuk bekerja selama 24 jam penuh tanpa diberi imbalan dari hasil kerjanya, baik itu biaya makan dan keperluan lainnya selama bekerja (Sinaga, [2018](#)). Pekerjaan yang dilakukan adalah menebang hutan dengan peralatan seadanya, ditambah serangan penyakit malaria dan binatang buas yang harus mereka hadapi pada masa itu. Jika di antara mereka ada yang mati, Pemerintah Kolonial Belanda tidak peduli akan hal tersebut. Di samping itu Kolonial Belanda juga membangun perkebunan di wilayah Kesultanan Bilah dan bekerja sama dengan para perusahaan asing dari Eropa (Wibowo, [2015](#)). Bentuk kerjasama dan perjanjian yang dilakukan pada umumnya memanfaatkan wilayah untuk kepentingan ekonomi maupun perkembangan perkebunan. Misalnya dalam hal membuka perkebunan baru, pihak Kolonial Belanda melakukan negosiasi dengan pihak Kesultanan Bila, hasil keuntungan perkebunan yang ditanam akan diberikan kepada Sultan sebagai pemilik daerah tersebut. Selain itu, pihak Kolonial Belanda juga mendatangkan para pekerja dari Jawa dan Cina (Akbar, [2018](#)).



Gambar 4. Salah satu perkebunan karet di wilayah hulu Sungai Bilah sekitar tahun 1927
(Sumber: Pasaribu, 2014).

Kemudian, perkembangan kerjasama tersebut berlanjut terhadap kesultanan-kesultanan lain di sekitar wilayah Kesultanan Bilah. Kerjasama tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi Kesultanan Bilah, di mana Kesultanan Bilah mendapat hasil dari perkebunan kelapa sawit dan karet yang telah dibangun Belanda, dan masyarakat Melayu Bilah mendapat gaji atau upah atas pekerjaan yang mereka lakukan. Sehingga perkembangan yang terjadi terhadap Kesultanan Bilah sedikit meningkat dari sebelumnya. Akan tetapi dibalik keuntungan yang Bilah dapatkan, ada juga kerugian seperti peraturan-peraturan yang ditetapkan Belanda terhadap Bilah sangat tidak wajar, karena peraturan yang dibuat sangat merugikan Kesultanan Bilah dan masyarakat Melayu. Seperti sistem kerja paksa dan tidak diberi upah, apabila melawan dan berhenti bekerja maka masyarakat Bilah akan dihukum bahkan akan dibunuh oleh Kolonial Belanda (wawancara dengan Sofyan Lubis).

Setelah Belanda mulai kehilangan pengaruhnya maka pada tahun 1942 Jepang mulai memasuki wilayah Indonesia termasuk Labuhanbatu. Kedatangan Jepang awalnya dianggap sebagai penyelamat masyarakat Labuhanbatu dari pemerintah Kolonial Belanda, namun hal itu justru semakin memperburuk keadaan. Perlakuan terhadap sultan-sultan yang ada di Labuhanbatu juga tidak sebaik saat pemerintahan Kolonial Belanda. Puncaknya pada tahun 1945, saat Proklamasi kemerdekaan membuat banyak dari kerajaan-kerajaan kecil taklukan Kesultanan Bilah memilih untuk bergabung, karena trauma yang dialami akibat dari kekejaman dari penjajahan Jepang.

Kemudian satu tahun setelah Proklamasi kemerdekaan Indonesia atau pada tahun 1946, Kesultanan Bilah juga tidak memiliki kekuatan dan pengaruh lagi dalam masyarakat atau rakyatnya, karena saat itu perubahan besar-besaran terjadi yaitu Indonesia ingin merdeka dari penjajah. Artinya mengubah sistem pemerintahan dari Monarki menjadi Republik. Keadaan ini dikenal dalam sejarah sebagai tragedi Revolusi Sosial yang menyebabkan banyak Kesultanan Melayu di Sumatera Timur, termasuk Kesultanan Bilah mengalami kehancuran. Sultan terakhir Kesultanan Bilah ialah Sultan Adil Bidar Alamsyah yang juga wafat karena peristiwa tersebut. Namun saat ini Kesultanan Bilah sudah memiliki sultan kembali, tetapi statusnya sebagai pemangku adat Kesultanan Bilah. Beliau adalah Tuanku Muhammad Risfansyah Bidar Alam yang ditabalkan sebagai Sultan Bilah kesepuluh pada tahun 2020.



Gambar 5. Sultan Tuanku Muhammad Risfansyah Bidar Alam
(Sumber: sultansinindonesieblog.wordpress.com).

SIMPULAN

Kesultanan Bilah menjadi salah satu kesultanan berpengaruh di wilayah Sumatera Timur, khususnya di Labuhanbatu. Kesultanan ini didirikan oleh Sultan Tahir Indra Alam pada pertengahan abad ke-17 M. Dalam perjalanannya, Kesultanan Bilah banyak terjadi pertikaian di dalam internal kerajaan yang menyebabkan terjadinya konflik di antara sesama mereka. Kesultanan Bilah memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan Kolonial Belanda, sehingga membawa dampak perubahan bagi kesultanan ini. Namun karena hubungan baiknya tersebut, kesultanan ini menjadi korban dari keganasan gerakan anti-feodalisme (Revolusi Sosial) pada tahun 1946. Setelah itu, kebesaran nama kesultanan ini hilang dan yang tinggal saat ini hanya puing-puing sisa masa kejayaannya pada masa lalu.

REFERENSI

- Akbar, A. (2018). Perkebunan Tembakau dan Kapitalisasi Ekonomi Sumatera Timur 1863-1930. *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 6(2). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v6i2.3522>
- Dahlan, A. (2014). *Sejarah Melayu*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

- Daliman. (2018). *Metode Penelitian Sejarah* (Cetakan II). Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Harahap, H., & Ramadhani, D. (2019). *Laskar Revolusioner Sumatera Timur: Dari Revolusi Sosial di Simalungun Sampai Kudeta Gubernur Sumatera*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hutagaol, N. M. (2016). Labuan Deli Kota Pelabuhan Tradisional. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 1(2). <https://doi.org/10.33373/his.v1i2.518>
- Ismail, R. H. (2012). *Sejarah Melayu: Cerakinan Sejarah, Budaya, dan Bahasa*. Pulau Pinang: University Sains Malaysia Press.
- Kartodirdjo, S., & Suryo, D. (1991). *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Nasution, F. (2016). *Kejayaan Kerajaan-Kerajaan Sumatera Timur dan sekitarnya Tempo Doeloe*. Medan: CV. Mitra.
- Ningsih, M., Melay, R., & Kamaruddin. (2016). Sejarah Kesultanan Bilah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara Tahun 1630-1945. *JOM Fakultas Ilmu Sosial dan Politik*, 4(1).
- Pasaribu, E. S. (2014). *Dari Kampung Labuhan Batu hingga Rantau Prapat: Perpindahan Pusat Administrasi Kolonial Belanda di Labuhan Batu Tahun 1865-1932*. Universitas Sumatera Utara.
- Pelzer, K. J. (1985). *Toeang Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria 1863-1947* (J. Rumbo, Trans.). Jakarta: Sinar Harapan.
- Perret, D. (2010). *Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut*. Jakarta: KPG.
- Reid, A. (2012). *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Sinaga, D. M. (2018). Aktivitas Perdagangan Deli Maatschappij di Sumatera Timur Tahun 1870-1930. *Avatara*, 6(1).
- Sinar, T. L. (2006). *Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur*. Medan: Yayasan Kesultanan Serdang.
- Sumanti, S. T., & Batubara, T. (2019). *Dinamika Sejarah Kesultanan Melayu di Sumatera Utara (Menelusuri Jejak Masjid Kesultanan Serdang)*. Yogyakarta: Atap Buku.
- Suwirta, A. (2002). Buruh Perkebunan di Sumatera Timur: Sebuah Tinjauan Sejarah. *Historia: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(3).
- Syarif, R. A. (2017). *Selayang Pandang Sejarah Labuhan Batu*. Rantauprapat: Kantor Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi Kabupaten Labuhanbatu.
- Wibowo, G. A. (2015). Kuli Cina di Perkebunan Tembakau Sumatera Timur Abad XVIII. *Sejarah Dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 9(1), 27–38. <https://doi.org/10.17977/UM020V9I12015P27-38>.

Daftar Informan

1. Raja Muhammad Azwin
2. Muhammad Zen Nasution
3. Sofyan Lubis